

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bandung yang saat ini menyandang predikat ibu kota Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu kota penting yang ada di Indonesia. Kota yang di awal abad ke-20 nyaris menjadi *hoofdstad* (modal) Hindia Belanda menggantikan Batavia ini memiliki akar sejarah panjang. Rentang perjalanan Bandung sebagai sebuah kota dapat dikatakan dimulai pada tanggal 25 September 1810.<sup>1</sup> Pada masa-masa awal pembentukannya tidak banyak perkembangan signifikan yang dialami Kota Bandung. Barulah setelah Bandung ditetapkan sebagai ibu kota Keresidenan Priangan pada tahun 1864 menggantikan kedudukan Cianjur, secara perlahan tapi pasti terjadi perubahan-perubahan yang cukup berarti pada tampilan Kota Bandung. Keberadaan Kota Bandung sebagai pusat politik pemerintahan Keresidenan Priangan ini kemudian diikuti pula oleh keberadaannya sebagai sentra Priangan ini kemudian diikuti pula oleh keberadaannya sebagai sentra produksi industri perkebunan besar di Priangan, seperti kopi, teh, kina, dan karet.<sup>2</sup> Untuk itu semua, pembangunan Kota Bandung hingga akhir abad ke-19 tampak

---

<sup>1</sup>Pada tanggal tersebut, Bupati ke-6 Bandung R.A. Wiranatakusumah II (1794-1829) tampil sebagai inisiator pembentukan Kota Bandung. Inisiatif Wiranatakusumah II ini secara tidak langsung mendapat akselerasi dari pemerintah Kolonial Belanda, melalui besluit yang dikeluarkan Gubernur Jendral H.W. Daendels. Lihat : Freek Colombin (ed) dkk, *Kota Lama, Kota Baru; Sejarah Kota-Kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan*, (Yogyakarta: Ombak, 2005), hal. 188.

<sup>22</sup>Lihat : Lampiran 1 Fotokopi *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie Tweede Druk*, 1917; hal 138-139, Jakarta : ANRI.

difokuskan untuk dapat memenuhi kebutuhan Kota Bandung, baik sebagai pusat kegiatan politik maupun pusat kegiatan ekonomi.<sup>3</sup>

Memasuki awal abad ke-20, sebuah perubahan mendasar kembali dialami Kota Bandung. Berdasarkan ordonansi tanggal 21 Februari 1906, Bandung memperoleh status wilayah administratif baru sebagai *gemeente*.<sup>4</sup> Sejak status *gemeente* disandang Kota Bandung tidak pelak lagi Bandung semakin memainkan peranan penting dalam percaturan politik dan ekonomi Pemerintah Kolonial Belanda.<sup>5</sup> Bandung pun tampil sebagai primadona tempat peristirahatan orang-orang Barat, khususnya Belanda. Berbagai prasarana dan sarana penunjang bagi sebuah kota modern kemudian banyak dibangun di Kota Bandung. Dari geliat pembangunan Kota Bandung dapat ditinjau bahwa bila perubahan-perubahan yang terjadi sepanjang abad ke-19 lebih didorong oleh karena keberadaan Bandung sebagai ibu kota Keresidenan Priangan, maka ketika memasuki abad ke-20 berbagai perubahan yang dialami Kota Bandung lebih dikarenakan oleh keberadaan Bandung sebagai sebuah *gemeente* dan kemudian

---

<sup>3</sup>Freek Colombiën (ed). *Op cit.*, hal.188.

<sup>4</sup>*Staatsblad van Nederlandsch-Indie* 1906 no. 121. Sejak kota Bandung ditetapkan sebagai sebuah *gemeente* (1906), di kota itu terjadi perkembangan aspek fisik. Sejalan dengan perluasan wilayah kota, berlangsung pula pembangunan dan atau peningkatan prasarana atau sarana dan atau fasilitas kota, baik untuk kepentingan masyarakat umum. Lihat : Hardjasaputra (ed), *Sejarah Kota Bandung 1906-1945*, (Bandung : Pemerintah Kota Bandung, 2000), hal.23. Ketika Bandung menjadi *gemeente*, nama organisasi ini diubah menjadi *Comite tot Behartiging van Bandoeng's Belangen* (Komisi Pembangunan Kemajuan Bandung). Lihat : Anton Solihin, "Bandung Vooruit; Lahir dan Peranannya dalam Pengembangan Kepariwisata di Bandung dan Sekitarnya (1925-1942)", Skripsi, (Jatinangor: Universitas Padjajaran Fakultas Sastra Ilmu Sejarah, 1994), hal.2.

<sup>5</sup>Dengan kata lain, tujuan utama pemebentukan *gemeente* adalah untuk melayani kepentingan orang-orang Eropa, khususnya Belanda. Lihat : Haryoto Kunto, *Semerbak Bunga di Bandung Raya*, (Bandung : Granesia, 1986), hal. 264-266; *Staatsblad* 1906. No. 121; Hardjasaputra (ed). *Op cit.*, hal. 7.

*stadsgemeente*.<sup>6</sup> Berbagai perubahan yang dialami Bandung tersebut lebih dikarenakan adanya desakan kebutuhan penduduk Kota Bandung sendiri.<sup>7</sup>

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat tentang pihak yang melakukan perencanaan kota, baik antara satu negara dengan negara lain, antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, maupun antara sistem politik yang satu dengan yang lain. Pada sistem pemerintahan yang menggunakan prinsip desentralisasi, kota-kota di tingkat lokal lebih mendapatkan otonomi yang berbeda-beda tergantung pada berbagai kebijakan dan kekuatan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi, serta situasi politik dan ekonomi di kota. Pada masyarakat yang menganut prinsip sentralisasi secara ketat, kebijakan-kebijakan dasar dan arahan pelaksanaan kerja disusun untuk satuan pemerintah di bawahnya, oleh badan yang berwenang di tingkat nasional, yaitu meliputi segi politik, militer, atau keagamaan yang bekerja secara terpisah atau dalam bentuk gabungan antar segi-segi tersebut. Kota-kota yang dihuni oleh masyarakat yang demokratis dapat direncanakan oleh struktur kekuatan yang terpisah-pisah yang terdiri dari berbagai kekuatan yang paling berpengaruh di dalam komunitas, oleh karena satu jenis kegiatan usaha dalam suatu *company town* (kota perusahaan), oleh pimpinan setempat di dalam suatu desa, atau oleh satu atau beberapa aktor dan organisasi. Pelaku-pelaku perencanaan tersebut dapat langsung melakukan kegiatan secara

---

<sup>6</sup>Dengan demikian maka sejak tanggal 1 Oktober 1926 ketentuan dalam *Staadsgemeente Ordonantie* berlaku untuk Gemeente Bandung, yang mulai pada tanggal tersebut haru dianggap sebagai *Staadsgemeente*. Lihat : Diding Kurniady dkk, *Sejarah dan Perkembangan Pemerintahan Kotamadya Dati. II Bandung*, (Bandung:Pemerintah Kota Bandung,1995), hal. 12.

<sup>7</sup>Fungsi yang diemban oleh kota, untuk menunjukkan keberadaannya, merupakan unsur dasar utama yang mempengaruhi setiap aspek dari berfungsinya dan berkembangnya suatu kota. Termasuk salah satunya ekonomi juga dapat mendasari kota-kota yang nantinya akan tercermin pada fasilitas dan bentuk fisiknya. Lihat : Melville C Branch, *Perencanaan Kota Komprehensif; Pengantar dan Penjelasan*,(Yogyakarta : Gajah Mada University Press,1995), hal. 38-40.

aktif atau secara tidak langsung dari balik layar. Di dalam situasi seperti itu, perencanaan terjalin ke dalam struktur masyarakat. Perencanaan secara komprehensif benar-benar tidak dapat dilaksanakan oleh satu atau beberapa orang saja, meskipun orang-orang tersebut memiliki pengaruh yang kuat di dalam proses perencanaan. Bahkan pada komunitas yang paling kecil dan paling sederhana, perencanaan melibatkan berbagai kegiatan, berbagai partisipan, berbagai bidang ilmu pengetahuan, serta berbagai tingkatan keputusan dan implementasi. Seseorang tidak mungkin dapat memahami secara analitis, jaringan yang terdiri dari elemen-elemen utama dan keterkaitannya yang terlibat di dalam perencanaan secara komprehensif bagi suatu kota industri yang moderen, yang sedikit banyak bertujuan untuk mengarahkan komponen operasional utama. Hal tersebut merupakan proses yang perlu dilakukan secara kolektif dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda dan partisipasi berbagai individu.<sup>8</sup>

Di Bandung perencanaan kota pada awal abad ke-20 merupakan hasil dari pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu merupakan struktur perwakilan dan administrasi dalam bentuk organisasi yang resmi dan berkekuatan hukum untuk menguasai dan menyelenggarakan kehidupan kota Bandung. Pemerintah Hindia Belanda menjalankan sistem pemerintahan sentralisasi dikombinasikan dengan sistem dekonsentrasi. Sistem tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya efisiensi, efektivitas, keseragaman<sup>9</sup> dalam

---

<sup>8</sup>Melville C. Branch, *Ibid.*, hal. 89-90.

<sup>9</sup>Dalam dunia baru itu kekuatan ekonomi utama di Jawa tidak lagi terletak di tangan Pemerintah tapi modal swasta. Sekitar tahun 1900 komunitas tak resmi yang sudah jauh lebih besar dan kaya di arahkan oleh segelintir korporasi kuat yang dengan mudah bisa mengambil tindakan bersama untuk melindungi kepentingan mereka, struktur ekonomi tidak lagi bersifat

pemerintahan, dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan atau perlawanan di daerah-daerah, serta agar kepentingan daerah-daerah diperhatikan. Akan tetapi, dalam kenyataannya pemerintah pusat tetap memikul beban berat, karena daerah-daerah (keresidenan dan kabupaten atau *afdeeling*) tidak memiliki hak otonom. Akibatnya, segala urusan atau permasalahan di daerah yang menyangkut kepentingan pemerintah kolonial, harus ditangani oleh pemerintah pusat di Batavia, sedangkan pemerintah pusat tidak mengenal baik kondisi dan permasalahan daerah. Di daerah khususnya kota Bandung yang memiliki penduduk golongan Eropa cukup banyak permasalahan yang harus ditangani atau diputuskan oleh pemerintah pusat, bukan hanya permasalahan mengenai pemerintahan, melainkan termasuk pula dalam permasalahan penduduk golongan Eropa, khususnya Belanda. Tahun 1900, penduduk golongan Eropa di kota Bandung berjumlah 1.522 orang, terdiri atas sejumlah orang pegawai pemerintah, para pengusaha (perkebunan, toko, hotel, pabrik, firma, pegawai swasta dan lain-lain). Tahun-tahun berikutnya, jumlah penduduk golongan Eropa dan perkembangan perluasan luas tanah di kota Bandung terus meningkat.<sup>10</sup> Mereka memiliki atau menghadapi permasalahan masing-masing. Oleh karena itu, mereka menuntut perlindungan dari pemerintah kolonial, sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku bagi mereka.

---

individualis tapi kapitalis. Lihat : J.S. Furnivall, *Hindia Belanda ; Studi tentang Ekonomi Majemuk*, (Jakarta : Freedom Institute, 2009), hal. 240-243.

<sup>10</sup>H.Blink, *Nederlandsch Oost-en West-Indie; Geographisch, Ethnographisch en Economisch Beschreven*, (Leiden : Brill, 1907), hal. 96. Dan S.A. Reitsma, *Bandoeng; The Mountain City of Netherlands India*, (Weltevreden : Kolff, 1926), hal. 4. Lihat : Lampiran 15 *Peta Perkembangan Kota Bandung dari 1906-1931*. Dalam buku Dana. W. Djefry, *Ciri Perancangan Kota Bandung*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Hal. 17-18.

Atas dasar hal-hal tersebut, pemerintah Hindia Belanda sampai pada keputusan bahwa sistem pemerintahan sentralisasi tidak perlu dipertahankan terus. Sistem sentralisasi<sup>11</sup> perlu diubah menjadi sistem desentralisasi,<sup>12</sup> tetapi bukan hanya desentralisasi dalam bidang keuangan, melainkan juga desentralisasi dalam arti pemberian hak otonom pemerintahan bagi daerah-daerah.<sup>13</sup> Dengan adanya pemerintahan otonom di daerah, maka tugas dan kewajiban pemerintah pusat menjadi berkurang, karena pemerintah kolonial di daerah berkewajiban untuk mengurus permasalahan di daerahnya menjadi tanggungjawab pemerintah daerah yang bersangkutan. Selain untuk mengurangi beban pemerintahan pusat, kiranya keputusan Hindia Belanda untuk menjalankan sistem pemerintahan desentralisasi, juga mengandung tujuan politis. Dilaksanakannya sistem desentralisasi, berarti di daerah-daerah yang cukup potensial, terutama bagi kepentingan pihak kolonial, perlu dibentuk pemerintahan otonom. Maka, dengan adanya pemerintahan otonom yang berkewajiban mengurus daerahnya secara langsung, berarti kekuasaan kolonial di daerah setempat bertambah kuat. Sebaliknya, pemerintahan pribumi (kabupaten) di daerah tersebut semakin tersisihkan.<sup>14</sup> Namun demikian, dalam

---

<sup>11</sup>Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkatan pusat. Sentralisasi banyak digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Bahkan pada zaman kerajaan, pemerintahan kolonial maupun di zaman kemerdekaan. Istilah sentralisasi sendiri sering digunakan dalam kaitannya dengan kontrol terhadap kekuasaan dan lokasi yang berpusat pada satu titik. Sumber: <http://mazzeko.wordpress.com/2012/05/03/112/> diakses pada hari sabtu tanggal 24 Mei 2014 pukul 15:16 WIB.

<sup>12</sup>Desentralisasi mencakup dua elemen pokok. *Pertama*, pembentukan daerah otonom. Dan *kedua*, penyerahan pemerintahan kepada daerah otonom tersebut. Sumber: <http://downloadjurnal.blogspot.com/2008/03/desentralisasi-teorlcakupan-dan-elemen.html> diakses pada hari sabtu tanggal 24 Mei 2014 pukul 15:17 WIB.

<sup>13</sup>J.S. Furnivall. *Op cit.* hal. 240.

<sup>14</sup>Hardjasaputra (ed). *Op cit.*, hal. 5.



merealisasikan tujuan tersebut, pada gilirannya penduduk pribumi pun turut menikmati fasilitas kota yang diadakan oleh pemerintah *gemeente*.

Mengenai sejarah Kota Bandung ini, sebelumnya telah ada beberapa tulisan. Meskipun demikian, tidak terdapat tulisan yang membahas secara mendalam mengenai pergulatan politik ekonomi masyarakat Kota Bandung (1906-1942) secara mendalam. Perlu ditegaskan bahwa dalam penelitian ini bukanlah berfokus pada kajian rinci mengenai lokalitas daerah Bandung pada tahun 1906-1942. Akan tetapi penelitian disini berfokus pada kajian aspek ekonomi yang lebih di dominasi oleh aspek politik (sistem pemerintahan Hindia Belanda) pada tahun 1906-1942 di Bandung. Ketika Belanda singgah di Bandung membentuk *gemeente* Bandung saat itulah terjadi perluasan wilayah dan perencanaan tata administrasi kota Bandung cukup baik dan perlu dicatat bahwa sektor perkebunan pada saat itu merupakan salah satu penyokong utama kemajuan *Bandoeng tempo doeloe*. Hal ini merupakan faktor yang membuat masalah ini menarik untuk diteliti. Maka, untuk memperdalam permasalahan tersebut perlu diketahui bahwa terutama sekitar tahun 1906-1942. Tahun 1906 merupakan tahun ketika Belanda mulai membentuk *gemeente* Bandung dan mulai saat itulah Bandung terjadi perluasan wilayah dan perencanaan kota Bandung yang cukup baik dan hingga tahun 1942 dipilih peneliti karena pada tahun itulah Belanda terakhir singgah di kota Bandung dan diganti kekuasaannya di Bandung oleh Bangsa Jepang. Selain itu, pada tahun tersebut pula diteliti agar bisa mengetahui dampak masyarakat Bandung terhadap kebijakan politik ekonomi Belanda.

Selain itu, alasan peneliti dalam menentukan judul penelitian “Pergulatan Politik Ekonomi Masyarakat Bandung (1906-1942)” tersebut yakni karena *pertama*, dengan judul penelitian tersebut peneliti cukup memiliki bekal pengetahuan untuk menggarapnya dan letak geografis Bandung yang masih cukup berdekatan dengan letak geografis tempat tinggal peneliti sehingga mengenai perkembangan Bandung setidaknya masih bisa terpantau oleh peneliti (*manageable topic*). *Kedua*, sumber cukup tersedia sehingga mendukung peneliti untuk menyusun penelitian ini (*obtainable topic*). *Ketiga*, judul penelitian tersebut merasa cukup penting untuk di teliti karena dalam masyarakat Bandung pada periode 1906-1942 tersebut terjadi suatu pergulatan politik ekonomi yang telah di bentuk dan di kuasai oleh pemerintah Hindia Belanda secara administratif dengan baik untuk di aplikasikan secara menyeluruh terhadap aktivitas masyarakat Bandung saat itu. Selain itu, secara tinjauan pustaka oleh peneliti bahwa ternyata peneliti lain yang menyangkut tulisannya seputar tentang Bandung belum ada yang menuliskan mengenai pergulatan politik ekonomi masyarakat Bandung pada periode tersebut secara fokus dan mendalam. Maka dari itu, peneliti berupaya untuk meneliti mengenai pergulatan politik ekonomi masyarakat Bandung (1906-1942) yang nantinya di harapkan kajian tersebut bisa memberikan sumbangan secara akademis sehingga dalam kajian tersebut menjadi cukup penting untuk di teliti (*significance of topic*). *Keempat*, dengan meninjau ketiga faktor yang telah di sebutkan di atas peneliti menjadi semakin ingin memperdalam dalam kajian penelitian tersebut karena dalam kajian itu peneliti akan berusaha memberikan tafsiran baru yakni mengenai sejarah kota yang di beri nuansa aspek



ekonomi yang nantinya dalam aspek ekonomi tersebut secara tidak langsung bermuatan aspek politik juga. Sebagaimana menurut Sartono Kartodirdjo bahwa dalam sistem global ekonomi mempunyai implikasi yang luas dan mendalam tidak hanya di bidang ekonomi tetapi erat hubungannya dengan itu juga di bidang politik.<sup>15</sup> Dan dalam pernyataan Sartono Kartodirdjo tersebut telah terwujud nyata bahwa yang terjadi dalam pergulatan politik ekonomi masyarakat Bandung (1906-1942) menjadi benar adanya. Adanya percaturan dualisme aspek politik dan ekonomi yang saling bergumul dalam masyarakat Bandung pada masa Hindia Belanda (1906-1942). Sehingga dalam kajian tersebut menjadi menarik untuk di teliti (*Interesting topic*).

Berdasarkan gambaran-gambaran di atas, usaha menganalisis percaturan politik ekonomi dalam kebijakan kolonial Belanda di Bandung yang telah mengembangkan Bandung dalam perolehan status wilayah administratif baru sebagai *gemeente*. Sejak status *gemeente* itulah disandang Kota Bandung semakin memainkan peranan penting dalam percaturan politik ekonomi pemerintah kolonial Belanda. Dengan demikian dalam penelitian ini fokus permasalahan akan dituangkan dalam menyusun skripsi yang berjudul: Pergulatan Politik Ekonomi Masyarakat Kota Bandung (1906-1942).

---

<sup>15</sup>Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal. 136.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan tersebut peneliti merumuskan beberapa pertanyaan pokok untuk memudahkan pembahasan berkaitan dengan tema penelitian. Adapun pertanyaannya sebagai berikut:

1. Bagaimana situasi dan kondisi Kota Bandung tahun 1906-1942?
2. Bagaimana terjadinya pergulatan politik ekonomi masyarakat Kota Bandung tahun 1906-1942?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari perumusan masalah tersebut, maka secara akademis tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan situasi dan kondisi Kota Bandung tahun 1906-1942.
2. Untuk menjelaskan terjadinya pergulatan politik ekonomi masyarakat Kota Bandung tahun 1906-1942.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Untuk membedakan topik penelitian ini dengan topik-topik penelitian yang lainnya. Sebelumnya peneliti, telah berupaya dalam menentukan topik penelitian yang akan dibahas, peneliti berusaha melakukan tinjauan pustaka terlebih dahulu terhadap peneliti-peneliti lainnya yang sebelumnya sudah membahas tentang wilayah Bandung terlebih dahulu. Tinjauan pustaka tersebut diantaranya :

1. Hardjasaputra, Sobana (ed). 2000. *Sejarah Kota Bandung 1906-1942*. Bandung : Pemerintah Kota Bandung. Meskipun memiliki persamaan dengan

penelitian penulis dalam kajian tahunnya yakni 1906-1942. Namun dalam pembahasan buku ini memuat pembahasan mengenai Bandung dari masa pendudukan Belanda, masa pendudukan Jepang hingga menjelaskan Bandung masa kemerdekaan. Tetapi tidak dijelaskan fokus secara rinci lebih mengenai Bandung masa pendudukan Belanda terutama dalam pergulatan aspek ekonomi dan politiknya.

2. Kunto, Haryoto. 1984. *Wajah Bandoeng Tempo Doeloe*. Bandung : Granesia. Serta, judul-judul buku karya Haryoto Kunto lainnya. Seperti *Ramadhan di Priangan Tempo Doeloe*, *Balai Agung di Kota Bandung* dan lain-lain. Dalam tulisan-tulisan Haryoto Kunto secara keseluruhan menggambarkan konsep Bandung secara keseluruhan. Dalam arti tulisannya tersebut lebih membahas segala aspek tentang Bandung, tetapi tidak terlalu fokus dalam suatu aspek dibahas secara mendalam.
3. Kurniady, Diding dkk. 1995. *Sejarah dan Perkembangan Pemerintah Kotamadya Dati.II Bandung* : Bandung. Secara intern penulisan dalam referensi ini hanya mendeskripsikan Bandung secara keseluruhan yakni dari pembahasan lambang, bendera, letak geografis dan iklim Kota Bandung, fungsi Kota Bandung serta sejarah Kota Bandung dari jaman penjajahan sampai jaman kemerdekaan. Bandung dibahas secara menyeluruh tetapi tidak fokus pada satu aspek kajian secara mendalam.
4. Solihin, Anton. 1994. "Bandoeng Vooruit; Lahir dan Peranannya dalam Perkembangan Kepariwisata di Bandung dan Sekitarnya." *Skripsi*.Jatinangor : Universitas Padjajaran Fakultas Sastra Jurusan Ilmu

Sejarah. Dalam skripsi Anton Solihin menjelaskan organisasi *Bandoeng Vooruit* (organisasi pengelola kepariwisataan) saja.

Dalam keempat tulisan para peneliti lainnya diatas yang mewakili para peneliti yang sebelumnya pernah membahas tentang Bandung. Dapat dilihat bahwa masing-masing para peneliti telah memiliki motif penelitian tersendiri dalam menentukan topik penelitiannya. Maka dari itu, rencana penelitian mengenai pergulatan politik ekonomi masyarakat Kota Bandung pun memiliki motif dan perbedaan tersendiri dalam penelitian dan penulisan tentang Bandung sebelumnya. Diantaranya yaitu peneliti lebih fokus pada aspek politik ekonomi Bandung di masa penjajahan Belanda yang akan berusaha dibahas secara mendalam. Selain dari itu, penulis akan menekankan metode penelitian sejarah dalam tinjauan prespektif sejarah. Serta, akan mengungkapkan beberapa teori sejarah yang berkaitan dengan topik penelitian untuk diuraikan menjadi tulisan. Sehingga, dalam penulisannya nanti peneliti akan menggabungkan antara teori, konsep dan realitasnya. Peneliti sampai saat ini belum pernah menemukan yang membahas mengenai pergulatan politik ekonomi masyarakat Bandung secara mendalam dan menyeluruh. Maka dari itu, peneliti akan berusaha mengungkapkan topik penelitian tersebut dalam penggalan sejarah.

#### **E. Langkah-Langkah Penelitian**

Dalam penelitan mengenai “Pergulatan Politik Ekonomi Masyarakat Kota Bandung Tahun 1906-1942” ini, menggunakan *metode historis* yakni metode penelitian sejarah. Metodologi Penelitian Sejarah terdiri dari empat tahapan kerja,

yakni heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.<sup>16</sup> Adapun langkah –langkah penelitiannya adalah:

#### 1. Tahapan Heuristik

Dalam tahapan ini, peneliti berusaha untuk mencari dan mengumpulkan beberapa sumber yang diperlukan, peneliti melakukan studi kepustakaan dan kearsipan di beberapa perpustakaan dan kearsipan. Diantaranya yakni : Perpustakaan Batu Api Jatinangor, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat Kawalayaan Bandung, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Jawa Barat Soekarno-Hatta Bandung, Depo Arsip Kota Wastukencana Bandung, dan Arsip Nasional Republik Indonesia Jakarta Selatan.

Jenis sumber sejarah yang diperoleh peneliti terdiri dari sumber tertulis dan sumber visual. Sumber tertulis yang berupa hasil dari tulisan-tulisan yang dimasukan untuk bahan sejarah seperti buku-buku, kronik catatan peristiwa dan sebagainya. Sedangkan sumber visual merupakan bahan-bahan peninggalan masa lalu yang berwujud benda atau peninggalan masa lalu yang berbentuk epigrafis,<sup>17</sup> seperti gambar atau foto-foto. Dan dalam tahapan pengumpulan data ini peneliti menggunakan studi kepustakaan dan kearsipan. Diantaranya data-data yang bersifat primer<sup>18</sup>diperoleh oleh peneliti adalah :

##### a. Sumber Tertulis

Sumber tertulis yang penulis dapatkan berupa buku dan arsip, yakni :

---

<sup>16</sup> E. Kosim, *Metode Sejarah Asas Dan Proses* (Bandung: Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UNPAD, 1984), hlm. 36-37.

<sup>17</sup> Hugiono Poerwantana, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992). hlm. 31.

<sup>18</sup> Sumber Primer diartikan sebagai sumber yang diperlukan sezaman berkaitan langsung dengan masalah yang akan diteliti.

- 1) Paulus. 1917. *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie Tweede Druk*. Leiden.  
Buku ini memberikan informasi bahwa Bandung dijadikan tempat tinggal *Preanger* kabupaten.
- 2) *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie*.1928 : 746-748.  
Menjelaskan tentang stuktur dewan provinsi Jawa Barat Kota Bandung didirikan berdasarkan lembaga Negara Hindia Belanda tahun 1906 No.121. Saat itu, walikota B.Coops 1 Juli 1917, walikota E.P. van Staden ten Brink dan M.Darnakoesoema. serta anggota-anggota lainnya.
- 3) *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie*.1907 : 670. Menjelaskan kondisi merujuk jalan di Jawa dan Madura, dimana daerah pedalaman dipertahankan. Tinggal kabupaten priangan dari Manonjaya tentang Banjar, Banjarsari, Kalipucang dan Parigi ke Cikalong.
- 4) *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*. 1905, No. 137 dan 181. No.137 mengenai *Desentralisatie Besluits* 1905 yang mengatur pementukan susunan kedudukan dan wewenang Dewan dalam mengelola keuangan yang terpisah dari pusat. No. 181 mengenai Ordonantie tanggal 8 Maret 1905 Lokal Raden Ordonantie adalah keputusan tertinggi pemerintah Hindia-Belanda yang mengatur tentang pembentukan Dewan-Dewan : *gewest, plaats, dan gemeente* (kotapraja).
- 5) *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*.1906, No.121. Menjelaskan alokasi dana untuk modal Kota Bandung dari dana umum Hindia-Belanda dan pembentukan dewan kota.



- 6) *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*. 1920, No. 150. Menjelaskan perubahan dan penambahan anggaran pengeluaran Hindia-Belanda untuk tahun buku 1920.
- 7) *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*. 1930, No. 438. Menjelaskan tata cara pembentukan Provinsi Jawa Barat pada 14 Agustus 1925.

b. Sumber Benda

Sumber benda dalam penelitian ini yaitu berupa data fotografis dan grafis. Data fotografis berupa foto-foto gambar yang diperoleh dari penelusuran buku-buku, foto peta Bandoeng Tempo Doeloe. Sedangkan data grafis berupa peta perkembangan dan perluasan wilayah Bandung dan tabel statistik jumlah penduduk kota Bandung. Data ini merupakan sumber primer diantaranya yaitu :

- 1) Foto Gb.10. Tatar Pringan, khususnya Kota Bandung sejak akhir abad 19 yang lalu telah dikenal di dunia internasional sebagai penghasil bubuk Kina yang terkemuka. Foto menunjukkan para buruh perkebunan sedang menguliti batang pohon kina.
- 2) Foto Gb.11. Teh merupakan komoditi ekspor Hindia Belanda yang utama pada tahun 1920-an, dan Tatar Priangan merupakan pusat perkebunan paling luas di Nusantara.
- 3) Foto Peta Bandoeng Tempo Doeloe. *Gemeente Bandoeng skala 1:10.000 October 1937*. Bandung : Depo Arsip Kota Bandung.
- 4) Peta Perkembangan Kota Bandung dari 1906-1931.
- 5) Peta perencanaan tata kota dan perluasan wilayah dari tahun 1906-1931 serta peta tata guna lahan dan batas kota Bandung tahun 2004-2013.

- 6) Tabel statistik jumlah penduduk kota Bandung, 1906-1970.
- 7) Peta Perluasan Wilayah Administratif Kotamadya Bandung Tahun 1906-1996.

Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan sumber sekunder<sup>19</sup> untuk mendukung penelitian terkait dengan aspek teoritik dan pendekatan yang berupa buku-buku yaitu:

- 1) Branch. C. Melville. 1995. *Perencanaan Kota Komprehensif; Pengantar dan Penjelasan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Buku ini memberikan informasi mengenai perkembangan perencanaan kota (perencanaan yang bersifat menyeluruh terhadap suatu kota). Kelangsungan hidup suatu kota yang memiliki maksud tunggal, misalnya untuk kelancaran kegiatan ekonominya, menuntut berfungsinya secara baik kegiatan produksi utamanya.
- 2) Santoso, Jo. 2006. *Kota Tanpa Warga*. Jakarta : Universitas Tarumanegara. Buku ini memberi informasi bahwa sangat penting untuk mengamati hubungan saling memengaruhi antara proses bumi yang mengkota dan proses globalisasi sistem ekonomi dan politik.
- 3) Colombijn, Freek (ed) dkk. 2005. *Kota Lama, Kota Baru; Sejarah Kota-Kota di Indonesia Sebelum dan Setelah Kemerdekaan*. Yogyakarta : Ombak. Buku ini bertujuan untuk memberikan stimulus dalam pengkajian terhadap sejarah perkotaan di Indonesia.

---

<sup>19</sup>Sumber Sekunder adalah sumber yang diperoleh secara tidak langsung seperti buku-buku laporan hasil penelitian yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif.

- 4) Kunto, Haryoto. 1984. *Wajah Bandoeng Tempo Doeloe*. Bandung : Granesia. Buku ini menginformasikan aspek-aspek kehidupan masyarakat kota Bandung, terutama kehidupan masyarakat Eropa masa Hindia Belanda.
- 5) Kunto, Haryoto. 1996. *Ramadhan di Priangan Tempo Doeloe*. Bandung : Granesia. Buku ini memberikan informasi mengenai suasana tradisi keagamaan di kota *Bandoeng tempo doeloe*, proses akulturasi agama Islam dengan budaya lokal Sunda telah lama berlangsung di Tatar Priangan.
- 6) Kunto, Haryoto. 1996. *Balai Agung di Kota Bandung*. Bandung : Granesia. Buku ini memberikan informasi salah satunya adanya informasi mengenai sumber benda yang bersifat grafis peta perluasan wilayah administratif kotamadya Bandung tahun 1906-1996.
- 7) Lubis, Nina. 1998. *Kehidupan Kaum Ménak Priangan 1800-1942*. Bandung : Pusat Informasi Kebudayaan Sunda. Buku ini memberikan informasi mengenai hubungan interaksi sosial antara kaum ménak (pribumi) sebagai elite birokrasi tradisional yang bersubordinasi kepada birokrasi kolonial.
- 8) Lubis, Nina dkk. 1956. *Sejarah Tatar Sunda; Jilid 1 dan Jilid II*. Bandung : CV. Satya Historika. Buku ini memberikan informasi mengenai perkembangan awal kekuasaan Eropa di tatar Sunda, eksploitasi kolonial, gerakan sosial dan perubahan masyarakat, hingga suasana di tengah pergerakan nasional Indonesia.

- 9) Suminto, Aqib. 1985. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta : LP3ES.  
Buku ini memberikan informasi bahwa Belanda sebagai kolonialis, pemerintah Belanda memerlukan *inlandsch politiek*, yakni kebijaksanaan mengenai pribumi, untuk memahami dan menguasai pribumi.
- 10) Dana. W. Djefry. *Ciri Perancangan Kota Bandung*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Dengan buku ini dapat ditemukan sumber benda bersifat grafis yakni berupa gambar 2.6. Peta Perkembangan Kota Bandung dari 1906-1931.
- 11) Solihin, Anton. 1994. "Bandoeng Vooruit; Lahir dan Peranannya dalam Perkembangan Kepariwisata di Bandung dan Sekitarnya." *Skripsi*. Jatinangor : Universitas Padjajaran Fakultas Sastra Jurusan Ilmu Sejarah. Dalam skripsi ini dapat diperoleh informasi mengenai gambaran umum wilayah Bandung tahun 1810-1925.
- 12) Kartodirdjo, Sartono. 1990. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru; Sejarah Pergerakan Nasional*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Buku ini memberikan informasi bahwa pada bagian bab tiga tentang kehidupan perkotaan.
- 13) Hardjasaputra, Sobana (ed). 2000. *Sejarah Kota Bandung 1906-1945*. Bandung : Pemerintah Kota Bandung. Buku ini memberi informasi tentang sejarah kota Bandung tahun 1906-1945.
- 14) Kurniady, Diding dkk. 1995. *Sejarah dan Perkembangan Pemerintahan Kotamadya Dati II Bandung*. Bandung : Pemerintah Kotamadya Daerah

Tingkat II Bandung. Buku ini memberikan informasi mengenai letak geografis, topografis dan iklim kota Bandung.

- 15) Katam, Sudarsono, Kartodiwirio. 2006. *Bandung; Kilas Peristiwa di Mata Filatelis Sebuah Wisata Sejarah*. Bandung : PT Kiblat Buku Utama. Buku ini memberikan informasi sumber benda bersifat grafis yakni peta perencanaan tata kota dan perluasan wilayah dari tahun 1906-1931 serta peta tata guna lahan dan batas kota Bandung tahun 2004-2013.
- 16) Kunto, Haryoto. 1986. *Semerbak Bunga di Bandung Raya*. Bandung : Granesia. Buku ini memuat tentang sejarah perkembangan dan pembangunan kota Bandung sejak jaman sangkuriang sampai tahun 2005 mendatang.
- 17) J.S. Furnivall. 2009. *Hindia Belanda; Studi tentang Ekonomi Majemuk*. Jakarta : Freedom Institute. Buku ini J.S.Furnivall memakai analisis dan diagnosa permasalahan sosial dan ekonomi di Hindia Belanda, tetapi sumbangan atau wawasan buku ini adalah diagnosa tentang ekonomi majemuk.
- 18) Irwana, Dian. 2011. *Penelusuran Sejarah; Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 1846-2014*. Bandung : Badan Perpustakaan, Arsip, dan Pengembangan Sistem Informasi Kabupaten Bandung.
- 19) Boeke. 1983. *Prakapitalisme di Asia*. Jakarta : PT. Intermasa. Buku ini memberikan informasi tentang gambaran masyarakat prakapitalisme dan masyarakat ketika terjadi kapitalisme.

20) Lindblad, Thomas. 1991. *New Challenges In The Modern Economic History Of Indonesia*. Leiden : Programme Of Indonesian Studies. Buku ini memberikan informasi bahwa gangguan pemerintah dalam ekonomi itu terjadi pada pula Jawa pada abad ke-19 dan sekitar awal abad ke-20.

## 2. Tahapan Kritik

Tahapan kritik adalah tahapan dalam menyelidiki, penilaian dan pengujian terhadap keaslian dan keabsahan data yang sedang diteliti secara kritis.<sup>20</sup> Dalam hal ini, tahapan kritik ini terbagi menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kedua macam kritik itu berfungsi untuk mengetahui keaslian sumber (otensitas) dan kredibilitasnya terjaga yang pada akhirnya diharapkan dapat diketahui apakah sumber tersebut relevan atau tidaknya dengan permasalahan yang diangkat.

Dalam kritik ekstern menguji keabsahan sumber tersebut asli atau tidaknya, yaitu dengan menyeleksi bentuk segi-segi fisik dan sumber yang didapat. Sedangkan pada kritik intern, peneliti akan menimbang dari segi isi, dan menimbang apakah isi buku itu dapat dipercaya atau tidak kebenarannya.<sup>21</sup> Pada tahapan ini, sumber data yang dihimpun untuk kemudian diuji melalui kritik yang tujuannya adalah untuk menyeleksi data dan fakta. Disamping itu kritik merupakan tahapan pengujian dalam menganalisa sumber, mengenai otensitas dan kredibilitas sumber secara ekstern dan intern.

---

<sup>20</sup> E. Kosim, *Loc cit.*, hlm. 36.

<sup>21</sup> Dudung Abdurrahman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Jakarta: PT Logos Wacan Ilmu, 1999), hlm 61.



a. Kritik Ekstern

1. Sumber Tertulis

a) Paulus. 1917. *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie Tweede Druk.*

Leiden. Sumber ini hasil *foto copy* dari aslinya yaitu berupa buku berjudul *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie Tweede Druk*. Kondisi fisik buku masih bagus, susunan lembarannya lengkap, tulisannya dapat terbaca jelas dan berbahan jenis kertas HVS putih. Buku tersebut diperoleh langsung dari Arsip Nasional RI. Dilihat dari tahunnya 1917 termasuk ke dalam periode kajian penelitian penulis, sehingga sumber ini dapat dikatakan sebagai sumber primer.

b) *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie*. 1928 : 746-748.

c) *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie*. 1907 : 670.

Semua *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie* diatas tersebut sumber ini hasil foto copy dari aslinya, kondisi fisik kertasnya warna kecoklatan sudah rapuh, masih dalam keadaan lengkap susunan lembarannya dan masih bisa dibaca isinya, dilihat dari tahunnya berkaitan dengan periode penelitian penulis. Sehingga, sumber ini dapat dikatakan sebagai sumber primer.

d) *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*. 1905, No. 137 dan 181. No.137.

e) *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*. 1906, No.121.

f) *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*. 1920, No.150.

g) *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*. 1930, No. 438.

Semua *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* diatas tersebut sumber ini hasil foto copy dari aslinya, kondisi fisik kertasnya warna kecoklatan sudah rapuh, masih dalam keadaan lengkap susunan lembarannya dan masih bisa dibaca isinya, dilihat dari tahunnya berkaitan dengan periode penelitian penulis. Sehingga, sumber ini dapat dikatakan sebagai sumber primer.

## 2. Sumber Benda

Kritik yang dilakukan pada sumber pimer berupa benda didapatkan pada bentuk data fotografis dan grafis. Data fotografis berupa foto-foto gambar yang diperoleh dari penelusuran buku-buku, foto peta Bandoeng Tempo Doeloe. Sedangkan data grafis berupa peta perkembangan dan perluasan wilayah Bandung dan tabel statistik jumlah penduduk kota Bandung, yaitu sebagai berikut :

- a) Foto Gb.10. Tatar Pringan, khususnya Kota Bandung sejak akhir abad 19 yang lalu telah dikenal di dunia internasional sebagai penghasil bubuk Kina yang terkemuka. Foto menunjukkan para buruh perkebunan sedang menguliti batang pohon kina. Gambar foto diperoleh dari buku Haryoto Kunto berjudul *Balai Agung di Kota Bandung* halaman 9. Gambar foto berwarna hitam putih, masih terlihat jelas, kemudian gambar foto tersebut di foto copy. Dilihat dari tahunnya gambar foto ini termasuk sumber primer.
- b) Foto Gb.11. Teh merupakan komoditi ekspor Hindia Belanda yang utama pada tahun 1920-an, dan Tatar Priangan merupakan pusat perkebunan paling luas di Nusantara. Gambar foto diperoleh dari buku Haryoto Kunto berjudul *Balai Agung di Kota Bandung* halaman 10. Gambar foto

berwarna hitam putih, masih terlihat jelas, kemudian gambar foto tersebut di foto copy. Dilihat dari tahunnya gambar foto ini termasuk sumber primer.

- c) Foto Peta Bandoeng Tempo Doeloe. *Gemeente Bandoeng skala 1:10.000 October 1937*. Bandung : Depo Arsip Kota Bandung. Diambil pada 18 Mei 2014, 08:25 WIB atas izin pihak Depo Arsip Kota Bandung. Peta tersebut kondisi fisiknya warna kertas sudah kecoklatan dibuat pada bulan oktober 1937, masih terlihat jelas. Peta ini termasuk kedalam sumber primer.
- d) Peta Perkembangan Kota Bandung dari 1906-1931. Gambar peta ini diperoleh dari buku Dana. W. Djefry berjudul ciri perkembangan Kota Bandung halaman 17-18. Kondisi peta dalam buku tersebut masih terlihat jelas, warna kertasnya sudah kecoklatan, kemudian di foto copy, dilihat dari tahunnya peta tersebut berkaitan dengan periode penelitian penulis.
- e) Peta perencanaan tata kota dan perluasan wilayah dari tahun 1906-1931 serta peta tata guna lahan dan batas kota Bandung tahun 2004-2013. Gambar peta ini diperoleh dari buku Katam Sudarsono Kartodiwirio berjudul kilas peristiwa di mata filatelis halaman 20-21. Gambar peta dalam buku tersebut masih terlihat jelas, bahan kertasnya HVS putih, kemudian di foto copy, dilihat dari tahunnya peta tersebut berkaitan dengan periode penelitian penulis.
- f) Tabel statistik jumlah penduduk kota Bandung, 1906-1970. Tabel statistik tersebut diperoleh dari buku Freek Colombijn berjudul kota lama kota baru

halaman 198. Kondisi fisik buku tersebut berwarna abu-abu sudah sedikit rapuh, tetapi data tabel statistiknya masih terlihat jelas dan terbaca, kemudian di foto copy dan diperbesar tabelnya agar dapat terbaca jelas. dilihat dari tahunnya tabel statistiknya berkaitan dengan periode penelitian penulis.

- g) Peta Perluasan Wilayah Administratif Kotamadya Bandung Tahun 1906-1996. Gambar peta perluasan wilayah tersebut diperoleh dari buku Haryoto Kunto berjudul balai agung di Kota Bandung halaman 9. Peta tersebut kemudian di foto copy, kondisi fisik bukunya sudah warna kecoklatan namun masih terlihat jelas dan terbaca, dilihat dari tahunnya peta tersebut berkaitan dengan periode penelitian penulis.

## b. Kritik Intern

### 1. Sumber Tertulis

- a) Paulus. 1917. *Encyclopedie van Nederlandsch-Indie Tweede Druk*. Leiden. Buku ini memberikan informasi bahwa Bandung dijadikan tempat tinggal *Preanger* kabupaten. Sejak tahun 1864 tempat yang sangat bagus, dengan iklim yang menyenangkan, lokasi geografis, termasuk dalam pandangan pertahanan Jawa, modal masa depan ditunjuk NI pada tahun 1916 Departement perang akan menjadi besar dengan perwira staf dan pejabat sipil dari Batavia ke Bandung benar-benar berjalan.
- b) *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie*. 1928 : 746-748. Dari segi isinya menjelaskan tentang stuktur dewan provinsi Jawa Barat Kota

Bandung didirikan berdasarkan lembaga Negara Hindia Belanda tahun 1906 No.121. Saat itu, walikota B.Coops 1 Juli 1917, walikota E.P. van Staden ten Brink dan M.Darnakoesoema. serta anggota-anggota lainnya.

c) *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie*.1907 : 670. Dari segi isinya menjelaskan kondisi merujuk jalan di Jawa dan Madura, dimana daerah pedalaman dipertahankan. Tinggal kabupaten priangan dari Manonjaya tentang Banjar, Banjarsari, Kalipucang dan Parigi ke Cikalong.

d) *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*. 1905, No. 137 dan 181. No.137 Dari segi isinya menjelaskan lembaran dari Hindia Belanda Desentralisasi. Ketentuan menggunakan pengaturan yang direkomendasikan untuk daerah dan bagian dari daerah di Hindia Belanda dan pada manajemen dan pertanggungjawaban dana sendiri dari daerah dan bagian dari daerah. No.181 menjelaskan desentralisasi syarat dari dewan ditetapkan untuk daerah dan bagian dari daerah dan pada pengolahan dan pertanggungjawaban dana sendiri dari wilayah perdaerahnya. Gubernur umum Hindia Belanda mendengar untuk semua orang yang mau mendengar atau membaca. Bahwa gubernur umum mengatur pada pengaturan direkomendasikan untuk daerah dan pada pengelolaan dan pertanggungjawaban dana sendiri berdasarkan ketentuan dengan keputusan 20 Desember 1904 No.39.

e) *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*.1906, No.121. Dari segi isinya menjelaskan desentralisasi, pemisahan dana untuk modal Bandung dari dana umum Hindia Belanda. Peraturan kebijakan Hindia Belanda diterapkan

untuk bagian dari kediaman Priangan kabupaten, membentuk ibukota Bandung.

f) *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*. 1920, No.150. Dari segi isinya menjelaskan ketika departement koloni E.Moresco merekomendasikan bahwa Gubernur Jendral Hindia Belanda, setelah mendengar Dewan Hindia Belanda semuanya ini diumumkan dalam berita resmi Hindia Belanda bahwa kepada para pejabat petugas dalam masing-masing dalam bisnisnya untuk saling menjaga dan tanpa memihak. Sesuai Undang-Undang ketat diatas yang ditandatangani oleh *Buitenzorg* pada 19 Maret 1920. J.V. Limbrug Strium sebagai sekertaris Jendral. (Keputusan Gubernur Jenderal Maret 1920 )

g) *Staatsblad van Nederlandsch-Indie*. 1930, No. 438. Dari segi isinya menjelaskan reformasi pemerintahan, Desentralisasi Provinsi Kabupaten Jawa Barat Mengatur perubahan ordo bangsa Provinsi Jawa Barat berdasarkan lembaran Negara 1925 No.378 dan tata cara untuk merujuk daerah di dalam provinsi kabupaten Jawa Barat.

h) Semua *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indie* dan *Staatsblad van Nederlandsch-Indie* diatas tersebut berkaitan dengan isinya berkaitan dengan peristiwa penelitian penulis sehingga sumber ini layak dikatakan sebagai sumber primer.

## 2. Sumber Benda

a) Foto Gb.10. Tatar Pringan, khususnya Kota Bandung sejak akhir abad 19 yang lalu telah dikenal di dunia internasional sebagai penghasil bubuk



Kina yang terkemuka. Foto menunjukkan para buruh perkebunan sedang menguliti batang pohon kina. Gambar foto diperoleh dari buku Haryoto Kunto berjudul *Balai Agung di Kota Bandung* halaman 9. Gambar foto ini terkait dengan peristiwa berkaitan dengan periode penelitian penulis. Sehingga gambar foto ini layak dikatakan sebagai sumber primer.

- b) Foto Gb.11. Teh merupakan komoditi ekspor Hindia Belanda yang utama pada tahun 1920-an, dan Tatar Priangan merupakan pusat perkebunan paling luas di Nusantara. Gambar foto diperoleh dari buku Haryoto Kunto berjudul *Balai Agung di Kota Bandung* halaman 10. Gambar foto ini terkait dengan peristiwa berkaitan dengan periode penelitian penulis. Sehingga gambar foto ini layak dikatakan sebagai sumber primer.
- c) Foto Peta Bandoeng Tempo Doeloe. *Gemeente Bandoeng skala 1:10.000 October 1937*. Bandung : Depo Arsip Kota Bandung. Diambil pada 18 Mei 2014, 08:25 WIB atas ijin pihak Depo Arsip Kota Bandung.
- d) Peta Perkembangan Kota Bandung dari 1906-1931. Gambar peta ini diperoleh dari buku Dana. W. Djefry berjudul *ciri perkembangan Kota Bandung* halaman 17-18. Dari segi isinya peta ini terkait dengan perkembangan luas wilayah Kota Bandung terkait dengan luas tanah yang ditempati bangunan dan jumlah penduduk dari tahun 1906-1931. Sehingga layak dikatakan sebagai sumber primer.
- e) Peta perencanaan tata kota dan perluasan wilayah dari tahun 1906-1931 serta peta tata guna lahan dan batas kota Bandung tahun 2004-2013. Gambar peta ini diperoleh dari buku Katam Sudarsono Kartodiwirio

berjudul kilas peristiwa di mata filatelis halaman 20-21. Dari segi isinya, peta ini menunjukkan awal mula peta pertama Kota Bandung sekitar tahun 1825-1936 berupa peta perencanaan tata kota serta peta tata guna lahan dan batas Kota Bandung tahun 2004-2013. Dalam pembahasan petanya terkait dengan periode penelitian penulis. Sumber ini termasuk sumber primer.

- f) Tabel statistik jumlah penduduk kota Bandung, 1906-1970. Tabel statistik tersebut diperoleh dari buku Freek Colombijn berjudul kota lama kota baru halaman 198. Dari segi isinya, tabel statistik tersebut membahas tentang ragam penduduk Kota Bandung dari tahun 1906-1970 serta peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Sumber ini termasuk sumber primer.
- g) Peta Perluasan Wilayah Administratif Kotamadya Bandung Tahun 1906-1996. Gambar peta perluasan wilayah tersebut diperoleh dari buku Haryoto Kunto berjudul balai agung di Kota Bandung halaman 9. Dilihat dari isinya, peta tersebut berkaitan dengan perkembangan perluasan wilayah administratif Kota Bandung tahun 1906-1996 berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri RI, 22 Januari 1985, No.135/313/POUD, Luas Kotamadya Bandung diperluas dari 8.098 Ha menjadi 17.000 Ha. Berdasarkan urutan permukaan asall, perluasan pada zaman Belanda, perluasan zaman Jepang, perluasan zaman Negara Pasunndan dan perluasan menurut rencana Kartsen. Sumber ini termasuk sumber primer.

### 3. Tahapan Interpretasi

Pada tahap ini peneliti menafsirkan fakta-fakta sejarah dari sumber-sumber yang telah dikritik. Peneliti melakukan kritik faktual sesuai dengan fakta yang diperoleh melalui sumber-sumber yang ada. Dari sumber-sumber yang didapatkan, dapat peneliti interpretasikan sebagai berikut:

Secara garis besar dapat ditafsirkan bahwa perekonomian Bandung dahulu ditopang sebagai salah satunya dari sektor perkebunan. Salah satu ciri khas perkebunan yang didirikan Belanda di setiap tanah jajahannya memiliki sistem administrasi dan birokrasi yang baik. Begitupun sama halnya dengan sistem ekonomi mengenai perkebunan di Bandung.

Untuk melancarkan aktivitas perekonomian kota Bandung, pihak Belanda menjalankan segala aksinya untuk membentuk sistem yang berunsurkan politis sebagai strategi demi mengeruk segala keuntungan baginya maka dibentuklah segala sarana infrastruktur, perencanaan kota Bandung secara administratif terus dilakukan dalam perluasan wilayah kota Bandung.

Dalam pemaparan diatas dapat di analisis bahwa pergulatan politik ekonomi masyarakat Bandung dalam kebijakan Belanda tersebut berkaitan dengan teori sejarah menurut Murthadha Muthahari dalam teori ekonominya merupakan kekuatan pendorong sejarah dalam segenap urusan sosial dan historis bangsa, baik insan budaya, politik, militer maupun masyarakat, mencerminkan metode produksi dan hubungan produksi masyarakat.<sup>22</sup> Dari teori ekonomi tersebut dapat ditafsirkan bahwa saat Belanda membuat kebijakan politik ekonomi yang

---

<sup>22</sup>Sulasman, *Metodologi Penelitian Sejarah; Teori, Metode dan Contoh Aplikasi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 163.

terorganisir baik terhadap masyarakat Kota Bandung. Maka, saat itulah Bandung dahulu dikenal sebagai pusat perkebunan paling luas di Nusantara.<sup>23</sup> Demikian juga, Bandung dikatakan sebagai kota yang maju. Karena perubahan basis ekonomi akan mendorong kemajuan masyarakat di dalamnya termasuk masyarakat Bandung tersebut. Sistem global ekonomi pada dasarnya memiliki sistem itu mempunyai implikasi luas dan mendalam tidak hanya berkaitan dengan bidang ekonomi saja, akan tetapi erat hubungannya dengan bidang politik.<sup>24</sup> Maka tidak heran jika yang terjadi di Bandung dalam kebijakan ekonominya dipenuhi pula dengan unsur politis. Pada akhirnya, dualisme aspek yang terjadi dalam masyarakat Bandung tersebut menjadi suatu pergulatan politik ekonomi masyarakat Kota Bandung (1906-1942).

#### 4. Tahap Historiografi

Dalam tahap ini peneliti merangkaikan fakta-fakta berikut maknanya secara kronologis dan sistematis menjadi tulisan sejarah sebagai kisah. Adapun sistematika penulisan yang digunakan ialah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka dan langkah-langkah penelitian.

Bab II Situasi dan Kondisi Masyarakat Kota Bandung Tahun 1906. Berisi Gambaran Umum Kota Bandung, Penduduk dan Pemukiman Masyarakat Kota Bandung, Kondisi Politik Masyarakat Kota Bandung, Kondisi Ekonomi Masyarakat Kota Bandung dan Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kota Bandung.

---

<sup>23</sup>Haryoto Kunto, *Balai Agung di Kota Bandung*, (Bandung : Granesia, 1996), hal.10.

<sup>24</sup>Sartono Kartodirdjo. *Loc cit.*, hal.136.

Bab III Pergulatan Politik Ekonomi Masyarakat Kota Bandung (1906-1942). Berisi Kebijakan Politik Ekonomi Hindia-Belanda di Bandung, Respons dan Dampak Kebijakan Pemerintahan Hindia-Belanda Terhadap Kondisi Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat Kota Bandung.

Bab IV Penutup berisi simpulan dari seluruh pembahasan berupa uraian singkat sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan pada perumusan masalah, serta saran dari peneliti terhadap hasil penelitian maupun terhadap masyarakat di Kota Bandung.

Daftar Pustaka berisi identitas sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian. Dan yang terakhir ialah disertai lampiran berisi berkas-berkas atau salinan dokumen-dokumen, arsip-arsip primer yang digunakan dalam penelitian.

